

POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA MASA LAMPAU, KINI DAN MASA DEPAN : SUATU TINJAUAN DAN SARAN KEDEPAN

Aiyub Mohsin

Dosen FISIP Universitas Nasional dan UIN Jakarta

aiyub_mohsin@yahoo.com

Abstract

The Foreign Policy can be defined as a policy and/or action pursued by a government in dealing with other state's government in order to achieve its national objectives, especially to safeguard its national interests abroad. The Foreign Policy of the Republic of Indonesia is a policy and/or an action to purportedly design by the government of Indonesia to achieve its national objectives especially to safeguard its national interest abroad. The guiding principal which serve in Indonesia's Foreign Policy execution is to pursue an independent and active line. The meaning of Independent is the Republic of Indonesia should not join to any political bloc or military pact, however it should be "Active to participate in creating a world peace based on freedom, lasting peace and social justice" (4th paragraph of the Indonesian 1945 constitution preamble). From the time's point of view, the Indonesia's foreign policy could be divided into five periods: 1) The period of Independent Struggle (1945-1950); 2) Paliamentary Democracy period (1950 —1959); 3) The period of Guided Democracy (1959-1965); 4) New Order periode (1966-1998); 5) The periode of Reformation (1998 – until now). The execution of foreign policy by the Indonesia's government in any period through or by diplomacy, taking into account the current issue(s), strategic environment and the agenda priorities which should be accomplished

Keywords: *foreign policy, diplomacy, independent and active principal.*

Tinjauan Agenda dan Dinamika Polugri Masa Lampau dan Sekarang

Pengertian dan definisi **Politik Luar Negeri (Polugri)** bermacam-macam diantaranya dikemukakan oleh William O. Chittick (1975): Politik Luar Negeri atau *Foreign Policy* menyangkut dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam hubungan dengan lingkungannya, khususnya dengan pemerintah-pemerintah negara-negara lain (*the foreign policy deals with the action of the government of a state in relation to its environment, especially the relation between that government and the governments of other states*). Pengertian lain dari Politik Luar Negeri

itu dirumuskan oleh Gibson (1980), sebagai rencana komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain. Dari kedua pengertian itu dapat dirumuskan bahwa Politik Luar Negeri atau Kebijakan Luar Negeri adalah kebijakan yang ditempuh oleh suatu negara dalam urusannya dengan negara lain, yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan pengertian dan definisi serta penelitian kami pada dokumen-dokumen resmi, maka Politik Luar Negeri Indonesia di masa lampau terbagi dalam beberapa priode:

1. Masa Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1950).

Kebijakan dan tindakan politik luar negeri secara resmi dirumuskan dan dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri (Kemlu) yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945, dua hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara baru yang belum banyak dikenal oleh masyarakat internasional, tugas utama Kemlu adalah menyebarluaskan informasi tentang kemerdekaan Indonesia itu kepada masyarakat internasional, dan tindakan selanjutnya berusaha untuk memperoleh pengakuan secara nyata (*de facto*) bahwa telah lahir sebuah negara baru di wilayah Asia Tenggara bernama Republik Indonesia (RI) yang telah dijajah oleh kolonialis Belanda selama 350 tahun. Negara baru itu telah memenuhi syarat-syarat Hukum Internasional yakni adanya pemerintahan yang didukung oleh rakyat dan mempunyai wilayah yang jelas batas-batas teritorialnya. Pengakuan tersebut diusahakan juga secara hukum (*de jure*). Menurut Michael Leifer (1989): Politik Luar Negeri Indonesia mendapatkan bentuk awalnya dari usaha-usaha republik ini memperoleh pengakuan internasional guna mencegah kembalinya kekuasaan colonial Belanda.

Usaha-usaha itu berakhir setelah kerajaan Belanda mengakui secara resmi negara dan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil dari Konperensi Meja Bundar (KMB) yang berlansung di Den Haag, Belanda.

2. Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959).

Setelah diperoleh pengakuan *de facto* dan *de jure* terhadap negara dan pemerintah Indonesia dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, 30 Desember 1949, Inggris, 1950, Cina, 1950; dibentuklah Kedutaan-Kedutaan Besar RI (KBRI) di beberapa negara antara lain di Washington AS., Paris, Perancis, dan Camberra, Australia. Serta Perutusan Tetap RI (PTRI) untuk PBB, setelah RI resmi diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 25 September 1950. Dengan sistim demokrasi parlementer yang dianut pada masa priode ini menimbulkan instabilitas politik yang mana kabinet tidak

berumur panjang akibat dari mosi tidak percaya dari pihak oposisi di parlemen, tercatat 7 (tujuh) kabinet yang umurnya rata-rata tidak lebih dari 13 bulan. Akan tetapi pada setiap kabinet itu tetap meng agendakan politik luar negerinya: mengusahakan penyelesaian masalah Irian Barat (sekarang Papua) yang belum selesai pada waktu KMB, dan terus memperjuangkan agar Irian Barat kembali kepangkuan RI. Tercatat dalam priode ini pada masa Kabinet Ali Satroamidjojo I, Indonesia menjadi salah satu sponsor terselenggaranya Konferensi Asia- Afrika, yang berlangsung di Bandung pada tanggal 18 – 24 April 1955, dan menghasilkan prinsip-prinsip Hubungan Luar Negeri yang disebut “Dasa Sila Bandung” atau *the Ten Bandung’s Principles*”.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965).

Dilatar belakangi kondisi social politik yang tidak begitu stabil yang ditandai dengan sering jatuh bangunnya kabinet dikarenakan perbedaan partai dan ideologi yang begitu tajam, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi: (1) tidak berlakunya lagi UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945, (2) pembubaran konstituante, (3) pembentukan DPR sementara dan DPA sementara. Sistim demokrasi yang dipakai setelah kembali ke UUD 1945 itu oleh Bung Karno dinamakan Demokrasi Terpimpin yang cocok dan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yakni menekankan musyawarah, namun dikendalikan oleh sang “Pemimpin” dalam proses pembuatan keputusan. Di bidang luar negeri, sebagaimana tertera dalam program kabinet melanjutkan perjuangan menentang imperialisme politik dan ekonomi, dan terus mengusahakan Irian Barat kembali kepangkuan RI. Pada priode ini di tataran internasional Bung Karno menggagas konsep “Nefos” = *New Emerging Forces* yakni negara-negara baru yang muncul dan merdeka setelah perang dunia kedua (PD II) berhadapan dengan “Oldefos” = *Old and Established Forces* yaitu negara-negara lama yang telah merdeka dan mapan sebelum PD II seperti kebanyakan negara-negara di Eropa. Dalam menghadapi Oldefos itu Bung Karno ingin tampil sebagai pemimpin Nefos. Pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri oleh Soekarno, menurut Michael Leifer (1989) merupakan suatu upaya untuk mengubah peranan internasional yang terbatas dan juga untuk mendapatkan kedudukan terkemuka dan kepemimpinan diantara negara-negara pasca kolonial lainnya. Hal ini terlihat antara lain pada waktu Presiden Soekarno didampingi Presiden Mobeito Kaita dari Mali, diutus ke Washington untuk menemui Presiden Kennedy guna menyampaikan hasil-hasil KTT Non Blok, yang berlangsung di Beograd pada tanggal 1-6 September 1961. Pemrakarsa KTT itu adalah PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Soekarno (Indonesia), PM Gamal Abdul Nasir (Mesir), Presiden Kwame Nkrumah (Ghana) dan Presiden Tito (Yugoslavia).Hal lain yang

perlu dicatat pada priode ini adalah Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai reaksi terhadap terpilihnya Malaysia sebagai anggota (tidak tetap) Dewan Keamanan PBB, yang mana pada waktu itu Indonesia sedang melakukan konfrontasi terhadap Malaysia sebagai sikap politik Indonesia yang tidak menyetujui penggabungan Malaya dengan Sabah dan Serawak dibawah dibawah arahan Inggris, sebagai kekuatan Oldefos. Masa Demokrasi Terpimpin, dalam literature politik Indonesia disebut juga masa Orde Lama.

4. Masa Orde Baru (1966 – 1998).

Orde baru muncul setelah keberhasilan rakyat Indonesia bersama-sama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menumpas Gerakan 30 September yang dibentuk Partai Komunis Indonesia (G-30 S/PKI) yang bermaksud merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila dengan ajaran marxisme/leninisme. Mayor Jenderal Soeharto, sebagai Panglima Kostrad pada waktu itu memimpin penumpasan dan kemudian menjadi Panglima TNI dan secara de facto menjadi penguasa republik, mulai tahun 1966, dan selanjutnya sebagai Pejabat Presiden, dan akhirnya menjadi Presiden RI definitif pada tahun 1968.

Kebijakan atau politik luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto berbeda jauh jika dibandingkan semasa presiden Soekarno. Tercatat beberapa hal penting yang terjadi pada masa awal pemerintahan Soeharto, yakni (1) Normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia, tanggal 11 Agustus 1966, (2) Indonesia kembali aktif sebagai anggota PBB, 28 September 1966, (3) Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN tanggal 8 Agustus 1967, (4) pembekuan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina-RRC, tanggal 1 Oktober 1967, dikerenakan keterlibatan RRC, dalam G-30-S/PKI.

Setelah penetapan dan pengangkatan jenderal Soeharto sebagai Presiden RI kedua oleh MPR, lembaga tertinggi yang salah satu kekuasaannya mengangkat dan memberhentikan presiden, menurut UUD 1945. Presiden Soeharto membentuk kabinet yang dinamakannya Kabinet Pembangunan (I) dengan menempatkan Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri. Agenda Politik Luar Negeri atau Polugri-nya dirumuskan sebagai berikut: (1) Penyelesaian utang dengan negara-negara sosialis, (2) Pelaksanaan Pepera atau Act of Free Choice/Self Determination di Irian Barat, tanggal 14 Juli – 4 Agustus 1969, (3) Memperjuangkan agar Irian Barat secara final dan diakui dunia internasional merupakan bagian dari wilayah Indonesia, (4) Mengirimkan kontingen Indonesia (Garuda V dan VI) sebagai pasukan penjaga perdamaian di Vietnam, Juli 1973 (Nazar Nasution, 2016). Mengenai penyelesaian utang dengan negara-negara sosialis seperti: Bulgaria, Cekoslovakia, Hongaria, Jerrman Timur, Polandian dan Romania

yang dibuat semasa pemerintahan Presiden Soekarno, dilakukan atas desakan negara-negara itu dikerenakan hubungan Indonesia dengan negara-negara sosialis setelah peristiwa G-30-S/PKI menjadi dingin tidak semesra semasa Presiden Soekarno. Pelaksanaan Pepera, dilaksanakan berdasarkan persetujuan New York (Bunker Plan) yakni setelah masa transisi Irian Barat dibawah pengelolaan PBB (UNTEA=the United Nations Temporary Administration) yang kemudian diserahkan kepada Indonesia, maka Pemerintah Indonesia, wajib menyelenggarakan Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pepera itu dilaksanakan pada 14 Juli – 4 Agustus 1969, hasilnya semua wakil rakyat Irian Barat yang terpilih menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia.

Hasil Pepera itu dilaporkan oleh Utusan sekjen PBB Dubes Ortis Sanz yang ikut menyaksikan Pepera itu kepada Sidang Majelis Umum PBB bulan September – Desember 1969. PBB akhirnya mengesahkan penggabungan Irian Barat ke dalam Negara Republik Indonesia. Tentang keikutsertaan kontingen Indonesia dalam penjaga perdamaian di Vietnam, sangat dihargai oleh pihak-pihak yang bertikai yaitu Vietnam dan Amerika Serikat. Hal lain yang perlu dicatat pada masa Orde Baru ini, Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia sejak berdirinya Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau *the Organisation of Islamic Conference (OIC)* pada bulan September 1969 di Marokko selalu aktif pada kegiatan-kegiatan OKI di bidang politik, ekonomi dan social budaya (poleksosbud). OKI kemudian namanya dirubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam atau *the Organisation of Islamic Cooperation (OIC)*.

Suatu peristiwa pada masa Orde Baru ini yang memberikan dampak pada bidang keamanan (militer) dan polugri (diplomasi) adalah keterlibatan Indonesia membantu perjuangan sebahagian rakyat Timor Timur (partai Apodeti, Kota dan Trabalista) untuk lepas dari kekuasaan Fretelin, partai ekstrem kiri yang secara sepihak memproklamirkan berdirinya “Republik Demokrasi Timor Timur” pada tanggal 28 November 1975. Atas permintaan ketiga partai tersebut, Indonesia mengirinkan “sukarelawanannya” ke wilayah Timor-Timur pada tanggal 7 Desember 1975, dan pada tanggal 17 Desember 1975 terbentuk pemerintahan untuk wilayah itu dibawah pimpinan Ketua Apodeti. Tindakan Indonesia terhadap Timor-Timur tidak diakui oleh Portugis, bekas penjajah wilayah itu dan negara-negara yang simpati kepadanya terutama bekas jajahan Portugis seperti Angola dan Muzambik di Afrika. Mulailah perjuangan diplomasi Indonesia di tataran bilateral, regional dan multilateral untuk mendapatkan dukungan atas kebijakan Indonesia. Dan perjuangan diplomasi itu baru berakhir pada masa pemerintahan Habibi yang menyetujui diadakan referendum bagi rakyat Timor-Timur (Timtim).

Suatu agenda Polugri Indonesia pada masa Orde Baru yang tidak harus dilupakan adalah Keberhasilan menyelesaikan masalah kamboja yang

diduduki Vietnam sejak Januari 1979, dengan mengundang pihak-pihak yang bertikai dan terkait untuk hadir pada “Jakarta Informal Meeting atau JIM”. JIM itu dilaksanakan dua kali, dan akhirnya Menlu Indonesia Ali Alatas terpilih sebagai *Co-Chairman* bersama Menlu Perancis pada

Konferensi Paris yang menghasilkan penyelesaian Kamboja secara tuntas dan dikukuhkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada era Presiden Soeharto itu, Indonesia dengan Menlunya yang *energetic* dan *smart* telah memberi sumbangan nyata kepada perkembangan dan kemajuan ASEAN, serta menjadikan ASEAN dalam arsitektur kawasan sebagai sentralitas dan pelopor, seperti dalam pembentukan Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC.

5. Masa Reformasi

1) Polugri dibawah kepemimpinan Presiden Habibie (Mei 1998 – Oktober 1999)

Di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, dan atas desakan sebahagian besar rakyat Indonesia, maka pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden, dan menurut UUD 1945, Wakil Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh BJ Habibie, ditetapkan sebagai Presiden sampai habis masa jabatan Soeharto yakni bulan Mei 2003.

Agenda Politik Luar Negeri masa Presiden Habibie dengan Menlunya juga Ali Alatas merumuskan: (1) mengusahakan dukungan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan komunitas negara-negara donor untuk pemulihan ekonomi Indonesia, (2) Menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas, (3) Meningkatkan peranan Indonesia dalam ASEAN (Nazar Nasution, 2016)

Pada masa ini, Presiden Habibie mengambil kebijakan tentang Timtim tanpa berkonsultasi secara intensif dengan Menteri-menteri yang terkait dan DPR, dengan menyetujui saran PM Australia John Howard, melalui surat tertanggal 19 Desember 1998, agar kepada rakyat Timtim diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri atau *an Act of Self Determination*. Oleh Habibie diputuskan bahwa pada tanggal 30 Agustus 1999 diadakan referendum bagi rakyat Timtim dengan dua opsi: mendukung otonomi khusus, yakni tetap bergabung dengan Indonesia, atau menentang otonomi khusus. Hasil referendum yang diawasi PBB itu menunjukkan mayoritas rakyat Timtim sebanyak 344.580 atau 78,5 persen menolak otonomi, dan 94.388 atau 21,5 persen mendukung otonomi. Dalam perkembangan selanjutnya pada 22 Mei 2002 PBB secara resmi mengakui Timtim menjadi sebuah negara merdeka dengan nama Timur Leste (Nazar Nasution, 2016: 98-100). Di kalangan ASEAN, Indonesia dipandang sebagai negara besar, “saudara tua tapi tidak mendekte dan bijaksana”, dan perannya dihargai

seperti berhasil meyakinkan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang mempunyai hubungan baik dengan Indonesia seperti Vietnam dan Kamboja, bergabung ke dalam ASEAN. Akhirnya negara-negara yang dimaksud yakni Vietnam menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 Juli 1995, Laos dan Myanmar tanggal 28 Juli 1997, terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999.

Usaha mendapatkan bantuan dari negara-negara maju dan dukungan IMF bagi pemulihan ekonomi Indonesia, terus dilakukan dengan meningkatkan Diplomasi Ekonomi yang mencakup peningkatan ekspor Indonesia ke luar negeri, menarik investor asing terutama dalam bentuk FDI sebanyak mungkin, dan meningkatkan promosi untuk menarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

2) Polugri pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999-Juli 2001)

Agenda Polugri di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Menlunya Dr. Alwi Sihab cukup realistis dan malahan sedikit ilusi seperti mencetuskan gagasan pembentukan persekutuan Indonesia- China-India, dua negara terakhir selalu bersaing dan berkonflik. Gagasan itu tidak pernah terealisasi dan malahan mendapat tantangan dari Jepang yang "merasa" ditinggalkan Indonesia dan "persekutuan" itu di tujuakan kepada Jepang untuk menandingi dominasi Jepang di Asia tenggara di sektor ekonomi. Begitupun gagasan hendak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, mendapat tantangan dari dalam negeri dan luar negeri, terutama dari negara-negara sahabat Indonesia di Timur Tengah dan anggota OKI. Walaupun Gus Dur berargumentasi bahwa 2 negara Arab, yakni Yordania dan Mesir telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi gagasan itu tidak pernah diwujudkan sampai Gus Dur dimakzulkan oleh MPR karena "skandal Bruneigate dan Buloggate" pada tanggal 1 Agustus 2001. Namun ada satu hal yang patut dikenang dan sampai sekarang masih berlangsung adalah persetujuan Gus Dur atas perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua dan memperbolehkan rakyat Papua mengibarkan bendera bintang Kejora yang menurut Gus Dur hanya sebagai bendera kultural warga Papua. Agenda polugri yang lain dan cukup realistis adalah peningkatan peran Indonesia di ASEAN antara lain dengan mengusulkan Timur Leste dan Papua Nugini diterima sebagai anggota ASEAN. Sampai sekarang kedua negara itu belum menjadi anggota ASEAN.

3) Masa Presiden Megawati (Oktober 2001- Oktober 2004)

Agenda Polugri di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dengan Menlunya Dr. Hassan Wirajudha terumus sebagai berikut: (1) Memulihkan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional, termasuk AS dan IMF, (2) Memerangi terorisme, dan (3) Menetapkan ASEAN sebagai

“corner stone” Politik Luar Negeri. (Nasution, 2016). Dalam pelaksanaannya dapat dikatakan cukup berhasil, seperti bantuan IMF sebesar US\$400 juta kepada Indonesia terlaksana. Begitupun hubungan dengan AS normal kembali setelah AS setuju memberikan bantuan peralatan militer kepada TNI.

Agenda polugri lain yakni memerangi terorisme dilakukan dengan antar lain mengunjungi Amerika Serikat guna menemui Presiden Bush untuk menyampaikan sikap Indonesia yang juga mengutuk terorisme dan empathy terhadap korban peristiwa 11 September 2001, dan bersedia berkerjasama dengan masyarakat internasional untuk memerangi terorisme. Dalam rangka melawan terorisme AS mengucurkan bantuan sebanyak US\$130 juta termasuk \$10 juta untuk pelatihan kepolisian (Nasution, ibid) Sejak ASEAN berdiri pada tahun 1967, Indonesia selalu menempatkan ASEAN sebagai lingkaran konsentrik pertama dari lingkungan strategis, dan dalam pelaksanaan polugri, terlihat banyak keputusan-keputusan penting yang disepakati Pimpinan-pimpinan negara anggota ASEAN terjadi di Indonesia seperti *Treaty of Aminaty and Cooperation—TAC*, hasil dari KTT ASEAN I di Bali tahun 1976, dan ASEAN Community yang mencakup APSC, AEC dan ASCC , hasil dari KTT di Bali tahun 2003. Namun, secara bilateral perjuangan untuk kepentingan nasional tidak mencapai hasil yang optimal dikarenakan strategi diplomasi yang ditempuh menghindari timbulnya “musuh” dengan mengusung semboyan: “*thousand friends zero enemy*”.

4) Polugri masa Presiden SBY (Oktober 2004-2009, dan Oktober 2009-2014).

Susilo Bambang Yudhoyono disingkat SBY menjadi presiden selama 10 tahun melalui pemilihan umum yang khusus untuk memilih Presiden dan Wakilnya secara langsung dan demokratis. Pada priode pertama SBY mengangkat Hassan Wirajudha sebagai menlunya, dan pada priode kedua mengangkat Marty Natalegawa sebagai menlunya. Baik Hassan maupun Marty adalah diplomat karir dan sebagai pegawai Departemen Luar Negeri. Agenda Polugri SBY pada priode pertama adalah (a) melanjutkan Politik Luar Negeri (Polugri) Bebas Aktif, (b) kerjasama internasional melawan terorisme, (c) meningkatkan ekspor dan menarik investor, (d) menyelesaikan kasus Aceh, (e) Diplomasi HAM Indonesia di forum multilateral, (f) melaksanakan interfaith dialogue, (g) terwujudnya komunitas ASEAN 2015, (h) melaksanakan total diplomasi. Beberapa catatan singkat dari pelaksanaan agenda tersebut dapat disampaikan sbb: mengenai (a), Sifat polugri Indonesia bebas aktif itu pertama kali diperkenalkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta kepada sidang KNIP, parlemen masa revolusi, melalui pidatonya pada tanggal 2 September 1948, berjudul “Mengayuh di Antara Dua Karang. Menurut Hatta, sifat Bebas dari Polugri adalah bebas menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh pihak lain, yang dalam

perwujudannya dalam masa perang dingin tidak memihak AS atau Uni Soviet, dan juga tidak mengikatkan RI dengan blok militer manapun; tapi aktif, bukan pasif dalam mewujudkan perdamaian dunia, sebagai perwujudan amanat konstitusi: “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (alenia ke-empat). Menurut SBY, pelaksanaan polugri bebas aktif itu selain tidak memihak kepada blok politik atau militer mana pun tapi aktif secara konstruktif dalam percaturan politik dunia dan bangga menampilkan identitas nasional di forum internasional. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, polugri Indonesia tidak begitu tegas (*firmed*) khususnya dalam masalah-masalah dunia yang krusial dan lebih banyak melakonkan sebagai “*good boy*” dan berusaha menjadi penengah yang baik, untuk menyenangkan pihak-pihak yang bertikai. (b) Menyelesaikan kasus Aceh. Usaha ini berhasil terutama dimotori oleh Wapres Yusuf Kalla dengan memperlakukan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM bukan sebagai gerakan separatis tapi sebagai entitas politik yang diakui kedudukannya sebagai subjek hukum internasional. Kerena itulah sebuah NGO bernama *Crisis Management Initiative (CSI)*, dipimpin oleh Martti Ahtisaari, mantan presiden Finlandia bersedia memfasilitasi perundingan antara pemerintah RI dan GAM. Setelah berunding beberapa kali antara utusan pemerintah RI dengan tokoh-tokoh GAM, maka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki ditandatangani sebuah MOU antara pemerintah RI dan Wakil GAM, disaksikan oleh pimpinan CSI, yang berisi butir-butir kesepakatan penyelesaian kasus Aceh secara damai, Tokoh-tokoh GAM kembali ke masyarakat Aceh, dan kini melalui pilkada beberapa diantara mereka memimpin provinsi Aceh. Akhirnya wilayah Aceh tetap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Tentang Interfaith dialogue (c), Indonesia meyakini pentingnya meningkatkan upaya global untuk mempromosikan *Interfaith Dialogue*, dialog antar agama dan peradaban, yang efek selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi berbagai masalah internasional termasuk terorisme dan ekstremisme. Indonesia, bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah telah menyelenggarakan berbagai dialog antar agama dengan mengundang delegasi dari berbagai agama dari seluruh dunia. Mengenai Diplomasi Ekonomi (d) Deplu/Kemlu, sejak pemerintahan Orde Baru, aktif melaksanakannya dengan berusaha me-resheduling utang-utang luar negeri yang dibuat pemnerintahahn sebelumnya dan berhasil meyakinkan negara-negara kreditor seperti Amerika Serikat, Belanda, Jepang bahwa utang itu akan dibayar pada waktunya dan untuk mencapai itu Indonesia perlu pinjaman baru sebagai suntikan dana bagi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Dari diplomasi yang dilakukan terbentuk kelompok negara-negara kreditor dengan nama “Inter Governmental Group on Indonesia” disingkat IGGI. Peranan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri atau Ditjen HELN,

Deplu sebagai mitra lembaga-lembaga ekonomi seperti Bappenas dan Departemen Keuangan sangat signifikan dalam usaha me-reschedule utang lama dan mendapatkan utang baru. Begitupun usaha meningkatkan ekspor khususnya komoditi non migas dan menarik investor asing, Ditjen HELN bersama-sama dengan lembaga pemerintah yang terkait seperti Departemen Perdagangan dan BKPM telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mensukseskan program dan usaha itu. Akan tetapi dalam rangka program “berbenah diri” yang dilakukan oleh Menlu pada masa pemerintahan Megawati, struktur organisasi Ditjen HELN di hapus, dan fungsinya diletakkan dibawah Direktorat Regional dengan status Eseleon III bagi pejabat yang menanganinya. Penghapusan Ditjen HELN itu telah memberikan dampak kurang efektif bagi usaha diplomat-diplomat di perwakilan Indonesia dalam mempromosikan ekspor dan menarik investor dikerenakan antara lain lambatnya respon dari Deplu dalam menangani, misalnya trade inquiries.

Adapun Polugri masa Presiden SBY kedua (Oktober 2009 – Oktober 2014) dengan Menlunya Marty Natalegawa, terumus dalam agenda sebagai berikut: (1) Meningkatkan peranan dan kontribusi Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia serta kesejahteraan melalui berbagai forum multilateral (PBB, GNB, Kelompok 77, OKI, APEC, dan G-20); (2) Indonesia bersama –sama dengan negara anggota ASEAN lainnya terus-menerus mendorong agenda demokrasi dan hak asasi manusia sebagai prioritas bagi pembentukan komunitas ASEAN 2015; (3) Indonesia ikut bersama ASEAN mencari penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan; (4) Menyelenggarakan Konferensi APEC 2013 di Bali; (5) Memulai proses negosiasi untuk mewujudkan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP; (6) Mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, solusi dua negara; (7) Meningkatkan perlindungan bagi TKI di luar negeri dengan memberikan prioritas berupa pencegahan, pengawasan dini dan perlindungan; (8) Turut berperan dalam usaha mewujudkan Millenium Develoment Goals – MDGs PBB. (disarikan dari Nazar Nasution, 2016)

Beberapa catatan dapat disampaikan terhadap agenda Polugri SBY priode kedua yang antara lain: (1) sesuai dengan amanat konstitusi, Indonesia terus berkontribusi dalam upaya PBB menciptakan perdamaian dan stabilitas serta keamanan internasional. Berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat internasional di tahun 2009 seperti krisis ekonomi, energi dan pangan, ancaman pandemik global serta perubahahn iklim.

Tantangan itu tidak mengenal batas negara, kerena itu harus dihadapi dengan pendekatan multilateral. Indonesia pd tahun 2010 berperan aktif juga dalam isu perlucutan senjata nuklir guna mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir. Sebagai koordinator bidang perlucutan senjata dalam GNB, Indonesia

telah memainkan peran utama pada “Non Proliferation Treaty- NPT review conference di tahun 2010 sehingga konferensi dapat menghasilkan keputusan final tentang perlucutan senjata nuklir.

Indonesia juga terus memainkan peran penting untuk menjadikan OKI relevan bagi kepentingan ummah. Dengan keyakinan Islam dan Demokrasi dapat hidup berdampingan atau compatible, maka Indonesia terus mendorong kerjasama di antara negara anggota OKI dalam berbagai bidang termasuk demokrasi, HAM, peran wanita di dunia Islam serta tak ketinggalan kerjasama dalam bidang ekonomi. (2) Tentang ASEAN, sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011 Indonesia menggagas pendirian ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, sebagai lembaga pendamai dalam menengahi dan menyelesaikan konflik yang timbul diantara negara anggota ASEAN. Indonesia mengharapkan agar Komisi HAM ASEAN agar lebih aktif mencari penyelesaian kasus-kasus HAM yang timbul di negara anggota ASEAN, seperti kasus pelanggaran HAM di Myanmar terhadap etnis Rohingya tanpa takut di cap “melanggar“ prinsip “non interference in the internal affairs of member state, sebagai konsekwensi adanya komitmen negara anggota ASEAN pada penghormatan HAM. Dalam isu Rohingya, seyogyanya Indonesia, sebagai “saudara tua” dan negara terbesar ASEAN tidak hanya cukup dan berhenti pada memberikan bantuan pangan, pakaian dan obat-obatan kepada pengungsi Rohingya, tapi bersikap lebih tegas dan firm dalam mengingatkan Myanmar baik secara bilateral maupun melalui ASEAN untuk segera menyelesaikan masalah etnis Rohingya dengan memberikan status kewarganegaraan dan jaminan keamanan yang permanen kepada warga etnis Rohingya disertai perlakuan yang adil dari pemerintah Myanmar.

Tentang perlindungan terhadap TKI di luar negeri, dapat dikatakan usaha pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu menunjukkan keberhasilan dengan antara lain pada tahun 2012 dapat membebaskan sejumlah TKI (110 orang) dari hukuman mati. Penurunan kasus yang dihadapi WNI di luar negeri sebanyak hampir 50%, dari 38.880 kasus tahun 2011 menjadi 19.218 kasus di tahun 2012, atau 0,43% dari keseluruhan WNI yang tercatat di luar negeri. Usaha selanjutnya, hendaknya pemerintah menetapkan semua TKI di luar negeri dilindungi dengan kontrak yang jelas, diketahui oleh Perwakilan RI setempat.

5) Polugri Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Oktober 2014 – Oktober 2019)

Joko Widodo dan Yusuf Kalla, masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk masa jabatan 5(lima) tahun, dan kemudian membentuk Kabinet Kerja dengan Menlunya Retno Marsudi. Adapun Agenda Polugri pemerintahan ini

mengacu pada Visi dan Misi yang disosialisasikan pada waktu berkampanye yang dikenal dengan **NAWA CITA atau 9 Agenda Prioritas**. Khusus untuk bidang luar negeri tertera dalam Nawa Cita itu adalah “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim” Dari Nawa Cita itu Menlu menjabarkannya dengan **Empat Prioritas Utama** yakni:

1. Berkomitmen untuk mengedepankan Identitas Indonesia sebagai negara kepulauan-- archipelagic state dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional. Agenda Prioritas ini diwujudkan melalui 5(lima) agenda aksi yaitu (1) Diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat dengan 10 negara tetangga; (2) Menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritime dan keamanan/kesejahteraan warga pulau-pulau terdepan; (3) Mengamankan sumber daya alam dan Zone Ekonomi Eksklusif—ZEE; (4) Mengintensifkan Diplomasi Pertahanan; (5) Meredam rivalitas maritime diantara negara-negara besar dan mendorong penyelesaian sengketa territorial di kawasan.
2. Meningkatkan peran global melalui “diplomacy middle power” yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif yakni memprioritaskan pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
3. Memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo- Pasifik berupa mengintegrasikan dua samudra yakni samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai lingkungan strategis pelaksanaan politik luar negeri di kawasan. Untuk mewujudkannya dirancang dan ditetapkan 5 (lima) agenda aksi, antara lain: konsolidasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan menjamin sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan dan kerjasama ekonomi kawasan, memperkuat dan mengembangkan kemitraan strategis bilateral, dan mendorong kerjasama maritime komprehensif khususnya melalui *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, asosiasi negara-negara pantai di lautan Hindia.
4. Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama Diplomasi Publik.

Dalam tataran operasionalnya ditetapkan 4(empat) prioritas Polugri semasa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla atau Jokowi –Kalla yaitu:

1. Menjaga Kedaulatan NKRI

2. Melindungi WNI dan Badan Hukum Indonesia—BHI di luar negeri
3. Meningkatkan Diplomasi Ekonomi
4. Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional.

Pada Pernyataan Pers Tahunan yang disampaikan Menlu setiap awal tahun, dan terakhir Pernyataan Pers Tahunan (2018) pada tanggal 9 Januari 2018 disampaikan capaian-capaian atau output yang diperoleh dari pelaksanaan program prioritas dan program aksi lainnya serta proyeksi kedepan.

Dalam usaha menjaga kedaulatan NKRI, sepanjang tahun 2017 telah dilakukan beberapa kali perundingan perbatasan yang meliputi 11 kali pertemuan penetapan batas maritim, 19 kali pertemuan demarkasi batas darat, dan 5 kali pertemuan Utusan Khusus Presiden RI dan Utusan Khusus PM Malaysia, membicarakan masalah perbatasan darat dan laut antara kedua negara, dan penandatanganan MoU on Survey and Demarcation of the Internasional Boundry antara Indonesia dan Malaysia.

Mengenai usaha perlindungan WNI dan BHI di Luar negeri, selama tahun 2017 Kemlu dan Perwakilan RI di Luar Negeri telah menyelesaikan 9.894 kasus WNI di luar negeri, dan membebaskan 14 WNI dari ancaman hokum mati, memfasilitasi pemulangan hampir 50.000 WNI, khususnya pekerja migran yang menghadapi situasi rentan di luar negeri, membebaskan 2 orang sandera di Filipina Selatan. Sekarang telah terbentuk Data base WNI di luar negeri yang terintegrasi penuh dengan data base nasional lainnya.

Dalam melaksanakan Diplomasi Ekonomi, telah dilakukan usaha-usaha menembus pasaran non tradisional untuk memasarkan produk/komoditas ekspor kita ke negara-negara di Afrika, Asia Tengah dan Amerika Latin. Usha ini telah meningkatkan nilai perdagangan ke wilayah itu lebih dari 100%. Beberapa produk industri strategis seperti gerbong kereta api berhasil dijual ke Bangladesh, dan produk pesawat dari PT Dirgantara Indonesia telah dibeli oleh Meksiko dan Senegal. Di bidang investasi, terdapat peningkatan yang tajam dari negara-negara Eropa. Suatu prestasi yang juga patut dicatat adalah berkat diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh semua perwakilan RI di luar negeri, “*Trade Expo Indonesia 2017*” di Jakarta telah dikunjungi 5.045 pengusaha dan pengunjung asing yang menghasilkan transaksi ekonmi sebesar US\$1,4 milyar. (disarikan dari teks Pernyataan Pers Tahunan.Menlu, tgl 9 Januari 2018).

Usaha-usaha Diplomasi ekonomi itu akan lebih sukses lagi kalau di dalam struktur Kemlu sekarang terdapat unit khusus semacam Ditjen HELN dahulu yang akan menjadi “*contact point*” bagi semua perwakilan RI di luar negeri melaksanakan diplomasi ekonomi, termasuk memudahkan koordinasi dengan pejabat-pejabat Eselon II dan I di Kementrian/lembaga eknomi yang terkait di Jakarta; tidak seperti sekarang ini counterpart dari Kemlu hanya pejabat eselon III. Begitupun penugasan diplomat-diplomat yang menangani

diplomasi ekonomi, hendaknya dipersiapkan secara matang, terlatih dan menguasai data perkembangan ekonomi Indonesia terakhir serta teknik-teknik promosi. dalam memasarkan produk ekspor, menarik investor dan turis asing.

Ulasan

1. Politik Luar Negeri, disingkat Polugri, sebagaimana dikemukakan oleh William O. Chittick dalam bukunya *the Analysis of Foreign Policy outputs* adalah menyangkut tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam hubungan dengan lingkungannya khususnya dengan pemerintah negara lain. Menurut Chittick, tindakan itu bisa berupa *actions* atau *in-actions*. Selanjutnya Chittick berpendapat dalam *actions* itu sendiri terkandung tindakan atau *actions* dan *behaviors* atau perilaku yang keduanya harus di refer sebagai capaian polugri atau *foreign policy outputs* (Chittick, 1975).
2. Polugri yang dianut dan dilaksanakan oleh setiap pemerintahan di Indonesia, secara normatif sejak masa revolusi nasional sampai masa reformasi sekarang tetap berpegang pada prinsip Bebas Aktif dengan nuansa yang berbeda-beda, disesuaikan dengan agenda prioritas dan lingkungan strategis yang berkembang.
3. Capaian Polugri Indonesia atau Foreign Policy Outputs secara umum cukup berhasil dan signifikan sesuai dengan tuntutan zaman pada waktu itu, khususnya di bidang politik yang memerankan Indonesia terlibat dalam percaturan politik dunia; hanya perilakunya (*behaviours*) yang berbeda, akibat pengaruh dari sifat dan karakter aktor utamanya baik Presiden/PM dan atau Menlunya. Menurut R.A Longmire dalam komentarnya terhadap buku yang ditulis Michael Leifer “Politik Luar Negeri Indonesia”, gaya atau perilaku polugri atau diplomasi Indonesia pada masa revolusi nasional adalah diplomasi konvensional, pada masa Demokrasi Terpimpin dengan aktor utama Soekarno adalah Diplomasi flamboyant dengan sedikit paksaan tanpa mengindahkan konvensi internasional, dan pada waktu Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto, kembali menta’i sistim dan konvensi internasional, akan tetapi khusus terhadap negara-negara anggota ASEAN, gaya diplomasi Indonesia sangat “tepo seliro atau “*low profile*” bahkan kadang-kadang tidak ada “ketegasan pendirian” demi menjaga persatuan ASEAN atau dapat dikatakan “*No Profile*”. Pada masa Reformasi khususnya pada masa SBY, Polugri Indonesia menurut beliau, bersifat konstruktif, tidak mengancam dan selalu diidentifikasi dengan perdamaian, dan para diplomat Indonesia hendaknya berusaha semaksimal mungkin dapat memerankan sebagai *peace maker*, *problem solver* dan *bridge builder*. Dampak dari sikap itu, sebagai salah satu contoh, kita dengan mudah

menyetujui keinginan Singapura untuk mengkaitkan Perjanjian Ekstradisi dengan “*Defence Cooperation Agreement--DCA* yang diusulkan Singapura, pada tahun 2007, yang berisi antara lain Singapura berhak menggunakan wilayah laut dan udara di sekitar kepulauan Natuna untuk latihan militer. Dalam tataran operasional atas pengarahan SBY yang tersebut diatas yang disampaikannya pada seminar di “*the Indonesian Council on World Affairs--ICWA* pada awal tahun 2005 menyebabkan para diplomat tidak dapat secara maksimal memperjuangkan kepentingan nasional kerana terikat dengan arahan tadi, khususnya dengan semboyan “*a million friends zero enemy*”

4. Dalam pelaksanaan semboyan “*a million friends zero enemy*” diplomasi kita terkesan dan dirasakan tidak teguh dan tegas atau *firmed and determined* dalam memperjuangkan kepentingan nasional seperti pengamanan garis perbatasan di Kalimantan dengan Malaysia, sengketa wilayah penangkapan ikan bagi nelayan-nelayan tradisional, dan masalah ekstradisi dan *money laundering*. Begitu juga dalam diplomasi memperjuangkan kepentingan dan perlindungan TKI di luar negeri kita selalu berlaku “*good boy*” dengan menghindari ketegangan dengan negara-negara penerima TKI itu. Dampak selanjutnya banyak kepentingan nasional kita tidak dapat dicapai secara maksimal.
5. Menghadapi Amerika Serikat sebagai satu-satunya Adidaya, kita terkesan tidak berdaya dalam menghadapi tekanan AS itu seperti dalam kasus nuklir Iran; yakni pada voting pertama di PBB kita berpihak AS yang menentang pembangunan instalasi nuklir di Iran; namun setelah kedatangan menlu Iran ke Jakarta yang bersuara secara lantang: “akan mencatat negara-negara yang berpihak AS, dan kemudian reaksi dari masyarakat (khususnya Islam) di dalam negeri, pada voting kedua kita berpihak kepada Iran”.
6. Mengenai masalah etnis Rohingya di Myanmar, kita bersama-sama ASEAN telah berusaha dan menghimbau agar pemerintahan Myanmar mengambil kebijakan dan tindakan yang memberikan rasa aman dan perlakuan yang sama bagi warga etnis rohingya itu dengan warga Myanmar lainnya. Sampai sekarang warga etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, walaupun mereka telah berpuluh, bahkan ratusan tahun sejak nenek moyang mereka menetap di provinsi Rakhine, dikerenakan berbeda etnis, warna kulit dan agama dengan mayoritas penduduk Myanmar.
7. Dalam hal diplomasi ekonomi, pada waktu Orde Baru peranan Deplu cukup signifikan, kerana adanya unit khusus dalam Struktur Deplu yakni Ditjen HELN. Unit itu bertindak sebagai koordinator, fasilitator dan negotiator dalam hal kegiatan-kegiatan yang berupa hubungan dan kerjasama ekonomi dengan luar negeri baik pada tingkat bilateral,

regional maupun multilateral. Namun setelah Ditjen HELN dihapus, digabungkan dengan Direktorat regional, dalam struktur Deplu, semasa Menlu Hassan Wirajudha, terasa bagi diplomat-diplomat di Perwakilan RI yang melaksanakan hubungan, kerjasama dan promosi ekonomi kehilangan *contact point* yang cepat dalam menangani hal-hal seperti *trade enquires*, mendapatkan *potensial partners* di dalam negeri dalam usaha menarik investor asing dan sebagainya. Penanganan kegiatan itu dilimpahkan kepada pejabat eselon III dalam Direktorat regional yang bersangkutan, yang *work load* nya begitu banyak karena mencakup masalah perdagangan, investasi, jasa-jasa ekonomi seperti masalah tenaga kerja, pariwisata dan angkutan udara dan laut. Berlainan pada waktu masih adanya Ditjen HELN, masalah-masalah itu masing-masing ditangani oleh satu Direktorat yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II. Untuk lebih meningkatkan intensitas dan capaian diplomasi ekonomi sudah semestinya dibuat lagi suatu Ditjen semacam Ditjen HELN dahulu.

8. Dialog antar agama dan peradaban, disebut *Interfaith Dialogue* yang diadakan Deplu sejak masa reformasi, dengan tujuan meyakinkan dunia bahwa antara Islam, Demokrasi dan Modernisasi dapat berkembang bersama-sama, dapat dikatakan sukses. Begitu banyak dialog antar agama seperti antara Kristen /katolik dan Islam, Budha dan Hindu dengan Islam, telah dilaksanakan berkali-kali dan mendapat sambutan yang mengembirakan. Begitu banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam menyambut dengan gembira dan telah mengadakan dialog dengan pemuka-pemuka agama Islam di Indonesia, utamanya dari kalangan NU dan Muhammadiyah. *Interfaith dialogue* ini perlu diteruskan.

Simpulan

1. Politik Luar Negeri Indonesia sampai sekarang tetap bersifat Bebas Aktif, dan tidak pernah terikat dengan blok-blok politik seperti blok AS dan blok Uni Soviet semasa perang dingin maupun pakta-pakta militer, serta tidak terpengaruh dengan kebijakan AS yang dikemukakan oleh Menlunya John Foster Dulles pada masa ke-presidenan Eisenhower (1953-1961) bahwa tidak ada sikap netral, dan “*if you are not with us means against us, the enemy of my enemy is my friend*”.
2. Capaian Polugri pada masa lalu dapat dikatakan signifikan, seperti keberhasilan para Diplomat Indonesia mendapatkan pengakuan *de facto* dan *de jure* dari sejumlah negara di Timur Tengah, walaupun Belanda dan negara-negara di Eropa tidak mengakui Indonesia sampai berakhirnya KMB yang diikuti penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Begitupun ditengah-tengah berkecamuknya perang dingin, Indonesia bersama 4 negara Asia

lainnya mensponsori KAA pada bulan April 1955 di Bandung yang menghasilkan “*the Bandung Ten Principles*”, disebut Dasa Sila Bandung yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi 33 negara Afrika mencapai kemerdekaannya.

3. KAA dengan hasilnya berupa “Dasa Sila Bandung” itu telah juga memberikan inspirasi kepada 5 pemimpin negara yang tidak terikat dengan 2 blok pada masa perang dingin yaitu : Tito dari Yugoslavia, Nehru dari India, Nasser dari Mesir, Nkrumah dari Ghana dan Soekarno dari Indonesia mensponsori pendirian Gerakan Non Blok (GNB) melalui KTT Non Blok pada bulan September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Walaupun perang dingin telah berakhir, GNB itu masih relevan dan di fokuskan pada perjuangan meningkatkan kerjasama ekonomi diantara peserta gerakan.
4. Pada masa Presiden Soeharto, Indonesia bersama 4 negara Asia Tenggara lainnya yakni Malaysia, Thailand, Philipina, Singapura tercatat sebagai pendiri ASEAN. Kini ASEAN yang semulanya hanya sebagai asosiasi telah menjadi suatu organisasi internasional dengan disahkannya Piagam ASEAN pada bulan Desember 2008. Keberlangsungan ASEAN sampai sekarang tidak terlepas dari gaya diplomasi Indonesia khususnya yang dilakukan dan diarahkan oleh Presiden Soeharto yang menekankan “persatuan ASEAN” harus dijaga ASEAN telah menjadi “*corner stone*” Polugri Indonesia, dan sebagai “*driving force*” terbentuknya organisasi-organisasi kerjasama kawasan (APEC) serta diusahakan terus menjadi sentralitas dalam arsitektur kawasan dalam mewujudkan kawasan Asia Tenggara dan wilayah pasifik yang damai, demokrasi dan sejahtera. Selain itu, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Organisasi Konferensi Islam (OKI) , termasuk kerjasama ekonomi melalui Bank pembangunan Islam yang menggalakkan hubungan dan kerjasama ekonomi diantara negara anggota/peserta OKI.
5. Pada masa Reformasi yang sampai sekarang telah mempunyai 5(lima) presiden dengan gaya diplomasinya berbeda-beda, namun tetap berpegang pada Politik Luar Negeri Bebas Aktif, dan terus aktif dalam organisasi-organisasi regional dan internasional dengan menjadi peserta/anggota seperti GNB, ASEAN, OKI, APEC, dan organisasi-organisasi tingkat kawasan lainnya.
6. Masalah-masalah lain yang menjadi fokus polugri kita adalah masalah perlindungan TKI, masalah perbatasan laut dan darat dengan negara-negara tetangga, dan peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain dalam memberantas illegal trading (narcotic and weapons), human trafficking dan terrorism. Selain itu perlu terus ditingkatkan diplomasi

ekonomi, untuk meningkatkan ekspor, menarik investor dan wisatawan asing ke Indonesia.

Kondisi Kawasan dan Global sa'at ini beserta kecenderungannya

Mengamati capaian-capaian Polugri Indonesia sampai saat ini, beserta masalah-masalah di sekitar kawasan seperti masalah etnis Rohingya, Laut Cina Selatan yang belum terselesaikan secara tuntas, dan memperhatikan perkembangan dan kecenderungan sekarang ini dan pada tahun-tahun akan datang berupa masih adanya instabilitas politik dan keamanan di tingkat regional dan global; dan adanya negara-negara seperti Amerika Serikat menarik diri dari komitmen Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim dan dari Komitmen Perjanjian Pembatasan Pengembangan nuklir dengan Iran.

Di pihak lain timbulnya semangat *CO-OPETITION (COOPERATIVE COMPETITION)*, yakni semangat bekerjasama di tengah dunia yang penuh persaingan untuk mencapai hasil yang maksimum baik di bidang ekonomi, keamanan dan politik. Begitu juga potensi *proxy conflict* di berbagai bagian dunia masih akan terus terjadi.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih rendah, walaupun terdapat kecenderungan naik sedikit yakni dari 3,6% tahun lalu, menjadi 3,7 % tahun sekarang dan diharapkan pada tahun depan mencapai 3,8 sampai 4%. Namun perang dagang antara AS dan RRT masih terus berlangsung seperti yang terlihat pada Pertemuan APEC di Papua Nugini, pertengahan November yang lalu sehingga tidak berhasil mengeluarkan *Leader's Declaration*. Keadaan itu sudah tentu memberikan dampak pada perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya di tingkat global dan regional.

Saran kedepan

Mengamati capaian-capaian Polugri Indonesia sampai sa'at ini, dan memperhatikan perkembangan dan kecenderungan di tataran regional dan global, serta perkembangan dan kebutuhan di dalam negeri, kami sampaikan saran agar agenda prioritas polugri kedepan khususnya bagi presiden terpilih, sebagai berikut:

1. Tetap terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, terutama dari potensi ancaman di tingkat kawasan dan global melalui forum-forum regional dan multilateral;
2. Terus meningkatkan perlindungan terhadap TKI sebagai migran workers di negara tujuan dengan membuat perjanjian dengan negara yang bersangkutan;
3. Melanjutkan diplomasi perbatasan melalui pembuatan perjanjian dengan negara-negara yang berbatasan untuk memagari wilayah daratan dan laut teritori kita dengan garis batas yang jelas dan permanen;

4. Mengintensifkan diplomasi ekonomi secara terencana dengan pelaku-pelaku diplomasi yang sudah dipersiapkan dengan matang, punya kompetensi dan minat dalam berpromosi serta di tunjang dengan dana yang cukup dengan diberikan target-target capain yang jelas dan terukur. Dalam hubungan ini sepatutnya diadakan unit khusus semacam Ditjen HELN dahulu dalam struktur organisasi Kemlu.
5. Memanfa'atkan forum-forum kerjasama di tataran sub-regional, regional dan global dapat berkontribusi dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Meningkatkan peran Indonesia dalam memecahkan permasalahan umat manusia seperti perubahahn iklim, penyakit menular dan narkoba;
7. Terus berperan serta dalam usaha menciptakan kawasan Asia Tenggara,dan Indo-Pasifik yang stabil, demokratis, aman dan sejahtera;
8. Khusus dalam kasus etnis Rohingya, Indonesia seyogyanya bersikap tegas terhadap Myanmar agar memberikan status kwarga negaraan kepada warga Rohingya dan jaminan keamanan. Sikap itu dapat dilakukan melalui forum ASEAN dan/atau secara bilateral dengan mengingatkan Myanmar sebagai negara sahabat agar secepatnya menyelesaikan masalah etnis Rohingya itu untuk menghindari "penghukuman" dunia sebagai pelanggar HAM, dan "Universal Declaration on Human Rights" PBB tahun 1948;
9. Terus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka, berdaulat dengan ibukota Yerusalem Timur, dan batas-batas wilayah yang diakui dunia internasional termasuk Israel.

Daftar Pustaka

- Azizat Murad, Alwis (ed), *To Buld the World Anew*, Speech by Presiden Ahmad Soekarno of Indonesia. On behalf of the Leaders of the Non Aligned Movement (*Inititive of Five: Gamal Abdel Nasser of Egypt, Kwame Nkrumah of Ghana, Jawaharlal Nehru of India, Ahmad Soekarno of Indonesia, and Josep Broz Tito of Yugoslavia*) at the 15th session of the United Nations General Assembly, published by the Indonesian Embassy, Addis Ababa, Ethiopia, 2003.
- Bresnan, John, "Indonesia, the Great Transition", dalam Nazar Nasution, *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Insan Cita, 2016.

Chattick, William O, *The Analysis of Foreign Policy Outputs*, Columbus, Ohio, USA: Charles E. Merill Publishing, 1975.

Gibson, “The Road to Foreign Policy”, dalam S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Marsudi, Retno, L.P., *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Tahun 2018*, Jakarta: Kementrian Luar Negeri.

Nasution, Nazar, *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Insan Cita, 2016.

The National Committee for the Commemoration of the 30th Anniversary of the Asian – African Conference, *Asia – Africa Speaks From Bandung*, Jakarta: Percetakan Negara, 1985.

United Nations, *Basic Facts about the United Nations*, New York, .USA: the Department of the United Nations, 2003.